

PERSPEKTIF AGRIBISNIS KAKAO DI SULAWESI TENGGARA

(Studi kasus Kabupaten Kolaka)

VALERIANA DARWIS DAN NUR KHOIRIYAH AGUSTIN¹⁾

Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian, Bogor
Badan Litbang Departemen Pertanian

ABSTRACT

Disease-pest attack is extremely affected cocoa harvesting. This paper also study cocoa agribusiness in Kolaka District, South-East Sulawesi which focused on production, price, marketing and institution aspects. The result shows production reduced 40 – 50 percent because of disease-pest attack, there is no price differentiation on fermented cocoa and unfermented cocoa, price transformation faster received to farmer when cocoa price reduced, the farmers which near subdistrict market are more free to sell their cocoa, and the farmer less access to inventory cooperative.

Keywords: Perspective, Agribusiness, Cocoa

PENDAHULUAN

Kakao berasal dari Benua Amerika pada bagian yang mempunyai iklim tropis. Sangat sulit untuk mengetahui negara bagian mana tepatnya tanaman ini berasal, karena tanaman ini telah tersebar secara luas semenjak penduduk daerah itu masih hidup mengembara. Tanaman ini mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1560 oleh orang Spanyol melalui Sulawesi (Hall. 1949) dan kakao mulai dibudidayakan secara luas sejak tahun 1970.

Pengembangan kakao di Indonesia tersebar di beberapa wilayah, dan yang termasuk propinsi sentra produksi kakao adalah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Lampung dan Propinsi Bali. Dalam agribisnis kakao ada beberapa kendala yang dihadapi, khususnya dalam peningkatan produktivitas dan kualitas yang dihasilkan antara lain adalah masih mempergunakan teknologi tradisional dengan bahan tanaman yang tidak berasal dari klon atau biji yang terpilih dan dengan budidaya yang kurang memadai, serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) berupa hama dan penyakit.

¹ Peneliti di Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian, Bogor

Selain permasalahan tersebut, dalam era globalisasi dewasa ini terdapat tuntutan terhadap produk yang dihasilkan harus memenuhi kualitas yang tinggi dan proses produksi akrab lingkungan. Fakta di lapang menunjukkan bahwa pengendalian hama di tingkat produsen saat ini masih terbatas pada penggunaan pestisida saja, sementara tuntutan konsumen mengarah kepada persyaratan lingkungan yang diakui oleh WTO (*ISO 14000*) dan *Codex Alimentarius* (adanya ambang batas maksimum kandungan zat tambahan, logam berat, residu pestisida dan bahan pencemar lainnya). Artinya, apabila kakao Indonesia ingin bersaing di pasar global maka mau tak mau persyaratan tersebut harus dipenuhi. Dengan melihat permasalahan dan tantangan yang dihadapi tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk melihat agribisnis kakao secara keseluruhan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2003 di Propinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu sentra dan wilayah potensial pengembangan kakao di Indonesia. Dengan pertimbangan yang sama dipilih Kabupaten Kolaka dan selanjutnya dipilih Kecamatan Lodonge sebagai lokasi penelitian. Agar terlihat keragaman dari agribisnis kakao, pemilihan desa di kecamatan dibedakan dari jarak desa ke pasar kecamatan. Dengan kriteria tersebut, maka terpilih Desa Ladonge yang dekat dengan pasar kecamatan dan sebaliknya Desa Raraa dan Desa Pange-pange untuk lokasi penelitian yang jauh dari pasar kecamatan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 60 petani, 3 group interview yang terdiri dari kelompok tani, aparat dan tokoh desa, beberapa pedagang input dan output, penyuluh, serta aparat dari dinas terkait. Data sekunder diperoleh dari dinas perkebunan, perdagangan, statistik dan dinas terkait lainnya. Data-data yang terkumpul tersebut dianalisa dengan metoda deskriptif, trend dan analisa tabulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Produksi Kakao

Sektor perkebunan merupakan andalan bagi pemerintah Sulawesi Tenggara dan tanaman perkebunan yang potensial serta paling banyak ditanam oleh masyarakat adalah tanaman kakao. Areal tanaman perkebunan kakao meningkat terus, karena adanya kebijakan dari pemda setempat yang memasukkan tanaman kakao sebagai tanaman prioritas yang

dipacu. Disamping peningkatan areal tanam, peningkatan produksi juga dapat dipacu melalui peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini sudah dilakukan pemerintah daerah dengan memberikan berbagai pelatihan. Hal ini juga dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta, maupun bantuan dari luar negeri. Adanya berbagai program peningkatan kakao, bagi petani merupakan langkah nyata untuk ikut memajukan agribisnis kakao. Hal ini menggambarkan dari keseriusan dalam mengikuti semua program yang ada, bahkan petani yang kebetulan tidak dapat ikut dalam program pelatihan tersebut akan mencari informasi ke petani peserta.

Selain adanya kebijakan dari berbagai pihak tersebut, dari segi lahan pun masih cukup tersedia. Saat ini di Propinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat potensi lahan yang belum diusahakan, yaitu sekitar 329 ribu hektar lebih, dan lahan yang terluas ada di Kabupaten Kendari yaitu hampir 50 persen dari luas lahan yang ada atau seluas 139.967 ribu hektar.

Sejak tahun 1990 hingga 2002 menurut data statistik perkebunan Sulawesi Tenggara, areal kakao meningkat terus dari 59.137 Ha pada tahun 1990 menjadi 127.547 Ha pada tahun 2002 (Tabel 1). Dalam pengertian lain untuk setiap tahunnya rata-rata luas areal tanaman kakao seluas 93.630 Ha, dan rata-rata pertumbuhan 4,13 persen setiap tahunnya. Sejalan dengan meningkatnya luas areal kakao, produksi komoditas ini juga menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 9,8 persen pertahun selama 1990-2002. Jika pada tahun 1990 produksi yang dicapai baru sekitar 23.567 ton, maka 12 tahun kemudian meningkat sangat pesat mencapai 93.900 ribu ton, dengan rata-rata produksi pertahunnya sebesar 67.410 ton. Ini berarti respon petani terhadap perkembangan kakao sangat positif, walaupun ada berbagai kendala yang dihadapi. Dari segi produktivitas tanaman kakao sangat bervariasi, produktivitas paling tinggi terjadi pada tahun 1993 (1.115,02 kg/ha) dan yang terendah pada tahun 1996 (891,23 kg/ha). Produktivitas rata-rata kakao di Propinsi Sulawesi Tenggara, sebesar 966,01 kg/ha, lebih tinggi dibandingkan produktivitas kakao nasional, yaitu sebesar 950,90 kg/ha

Tabel 1. Perkembangan Areal, Produksi dan Produktivitas Kakao di Sulawesi Tenggara (1990-2002)

Tahun	Areal (000 Ha)	Produksi (000 Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1990	59,137	23,57	1020,17
1991	75,124	38,18	1109,47
1992	74,372	39,25	958,89
1993	76,337	48,58	1115,02
1994	84,274	44,04	906,26
1995	92,061	51,13	918,67
1996	95,065	54,50	891,23
1997	97,027	62,94	952,63
1998	96,658	75,77	1129,51
1999	109,510	71,49	951,35
2000	113,275	69,36	899,19
2001	116,801	86,66	1019,51
2002	127,547	93,90	986,99
Rata2	102,92	67,41	966,01
Trend (%/th)	4,13	9,8	2,43

Sumber : Statistik Perkebunan Sulawesi Tenggara, 1990-2002

Salah satu sentra penghasil kakao di Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Kolaka dengan kecamatan sentra yang paling banyak menghasilkan biji kakao adalah Kecamatan Ladonge. Luas areal kakao di Kabupaten Kolaka pada kurun waktu lima tahun belakangan ini memperlihatkan terjadinya penambahan luas sebesar 6,31 persen pertahun atau rata-rata areal tanamnya 71.767 ha/tahun (Tabel 2). Peningkatan ini juga terjadi pada produksinya, yaitu dari 59.899 ton pada tahun 1998 menjadi 74.614 ton pada tahun 2002.

Tabel.2. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kakao Rakyat di Kabupaten Kolaka

Tahun	Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1998	63959	59899
1999	67815	57812
2000	70518	55926
2001	74834	63595
2002	81709	74614
Rata2	71767	62369,2
Trend (%/th)	6,31	5,65

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka, 2002

Perkembangan Harga Kakao

Perkembangan harga kakao di propinsi ini sangat berfluktuatif, baik di tingkat petani, maupun di tingkat pedagang pengumpul dan pedagang antar pulau (Tabel 3). Patokan harga di setiap level tata niaga semuanya mengacu kepada harga yang berlaku di Kawasan Industri Makasar (KIMA) yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Sudah menjadi rahasia umum, apabila ada penurunan harga di KIMA maka semua pemain di rantai tata niaga ini akan mengikutinya serta informasi tersebut akan cepat sampai ke tangan petani. Sebaliknya, apabila ada kenaikan harga, maka informasi itu sampai ke tangan petani tidak secepat bila terjadi penurunan harga.

Dengan minimnya data yang terkumpul, diperoleh harga rata-rata perkilogram kakao pada Tahun 2002 di Sulawesi Tenggara adalah Rp. 9.125,00 (petani), Rp. 10.488,00 (pedagang pengumpul) dan Rp. 12.063,00 (pedagang antar pulau). Sedangkan harga rata-rata perkilogram kakao di Kabupaten Kolaka sedikit lebih mahal dibandingkan harga rata-rata propinsi, yaitu : Rp. 10.750,00 (petani), Rp. 1.592,00 (pedagang pengumpul) dan Rp 12.250,00 (pedagang antar pulau). Dalam tahun 2003 harga kakao tertinggi terjadi di bulan September, Oktober dan November. Hal ini disebabkan oleh produksi yang rendah, sementara musim puncak yang terjadi selama ini antara bulan Mei hingga Agustus.

Tabel 3. Keragaan Harga Kakao Bulanan di Tiga Pelaku Perdagangan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kolaka tahun 2002. (Rp/Kg)

Bulan	Sulawesi Tenggara			Kabupaten Kolaka		
	Petani	Pdg. Pengumpul	Pdg. Antar Pulau	Petani	Pdg. Pengumpul	Pdg. Antar Pulau
Januari	7750	8300	12000	9000	9000	12000
Februari	8000	8500	-	11500	12000	12500
Maret	8625	10625	-	-	10500	-
April	8000	10000	-	-	10700	-
Mei	8000	10500	10500	-	9000	-
Juni	8000	8550	-	-	10000	-
Juli	8250	11000	-	10500	11000	-
Agustus	8000	9600	-	-	13000	-
September	13000	13000	13250	-	14400	-
Oktober	12500	14500	-	-	14000	-
November	8375	9300	12500	12000	14000	-
Desember	11000	11500	-	-	11500	-
Rata-rata	9125	10448	12063	10750	11592	12250

Sumber :Dinas Perkebunan Sulawesi Tenggara, 2003

Agribisnis Kakao

1. Aspek Produksi

Pestisida

Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pergeseran serangan hama penyakit tanaman kakao. Pada tahun 2002 hama yang dominan adalah PBK, sedangkan pada tahun 2003 adalah busuk buah. Menurut petani serangan busuk buah tersebut bisa mengurangi hasil panen kakao 40 sampai 50 persen. Perubahan iklim yang tidak menentu (anomali) menyebabkan berkembang biaknya hama busuk buah dan akibat lebih lanjut lagi terjadi pengurangan produksi. Selain itu hama penyakit yang biasa menyerang kakao petani responden adalah: kangker batang, helopeltis, jamur dan ulat batang.

Dalam memberantas hama penyakit tersebut petani umumnya menyemprot dua sampai tiga kali dalam sebulan dengan dosis masing-masing jenis pestisida paling banyak 1 liter untuk sekali semprot dan ada juga yang menyemprot dengan dosis seadanya (tergantung dana). Jenis pestisida yang digunakan oleh petani responden hampir sama, hal ini disebabkan oleh lokasi kebun atau rumah mereka yang relatif berdekatan. Informasi hama penyakit kakao dan pestisida apa yang dipergunakan untuk memberantasnya sering mereka diskusikan di kebun sambil melihat serangan dan gejalanya. Adapun jenis pestisida yang umum dipergunakan adalah Decis, Aripheo, Acodan, Unimex, Matador dan Theodan dan tidak terlalu sulit bagi petani untuk mendapatkannya, karena banyak yang menjualnya. Petani responden bisa mendapatkan berbagai jenis pestisida tersebut di kios-kios tani bagi yang membayar dengan tunai atau di pedagang-pedagang kakao bagi petani responden yang mengutang.

Pupuk

Kakao dipupuk setelah berumur dua bulan dilapangan. Pada tanaman belum menghasilkan pemupukan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan mempertahankan daya tahan tanaman terhadap hama penyakit. Sisa pemangkasan dan kulit buah kakao yang ditanamkan ke dalam tanah antara barisan pohon kakao merupakan sumber hara bagi tanaman kakao. Kulit buah kakao pada tanaman menghasilkan mengandung Nitrogen, Fosfor, Kalium, Magnesium, dan Kalsium yang setara dengan Urea, TSP, MoP dan kieserit yang dibutuhkan tanaman kakao. Selain itu bisa juga menghindari infestasi penggerek buah kakao (PBK) yang sangat merugikan. Bagi tanaman yang sudah berproduksi, pupuk yang umum dipergunakan oleh petani kakao di lokasi penelitian ini adalah UREA (233 kg), KCL (173 kg) dan TSP (182 kg) per hektar.

Panen

Untuk memanen kakao digunakan pisau tajam yang berbentuk huruf L dengan bagian tengah agak melengkung. Bila buah tinggi maka pisau disambungkan dengan bambu. Selama memanen buah kakao harus diusahakan untuk tidak melukai batang/cabang yang ditumbuhi buah. Pelukaan akan mengakibatkan bunga tidak akan tumbuh lagi pada tempat tersebut. Pemanen buah kakao hendaknya dilakukan hanya dengan memotong tangkai buah tepat dibatang/cabang yang ditumbuhi buah. Dengan demikian tangkai buahpun tidak tersisa dibatang/cabang sehingga tidak menghalangi pembungaan.

Pemecahan kulit dilaksanakan dengan menggunakan kayu bulat yang keras, bagi yang sudah terbiasa dapat mempergunakan parang tajam tanpa ada luka di biji. Bila kulit telah terbagi dua, kulit bagian ujung dibuang dan tangan kanan menarik biji dari placenta. Biji kemudian ditempatkan di atas lembaran plastik atau dalam keranjang bambu yang diberi alas.

Penen yang dilakukan oleh petani sangat tergantung dari luas areal kebun kakao yang dimiliki. Pada umumnya mereka panen dua sampai tiga kali dalam seminggu. Hasil panen dikumpulkan di ladang, kemudian langsung dibuka dan yang dibawa pulang adalah biji kakao. Biji kakao tersebut sampai di rumah langsung dijemur dihalaman selama 4 sampai 7 hari. Proses pengeringan biji kakao rakyat tersebut sangat tergantung oleh adanya panas matahari. Namun tidak jarang kakao yang belum kering benar, sudah ditawarkan oleh pedagang pengumpul yang mendatangi rumah-rumah petani.

2. Aspek Pemasaran

Petani

Dalam satu tahun terakhir ini, semua petani yang ada di lokasi penelitian tidak melakukan fermentasi dalam menjual biji kakao. Hal ini dikarenakan tidak adanya perbedaan harga antara kakao yang difermentasi dengan yang tidak difermentasi atau lebih umum dengan sebutan asalan. Sementara itu untuk melakukan fermentasi petani harus menyimpan dalam peti selama 4 – 6 hari dan setiap harinya mesti diperhatikan kandungan airnya dan menurut petani pekerjaan ini termasuk melelahkan. Tetapi pada tahun 2001 harga biji kakao yang difermentasi lebih tinggi berkisar antara Rp. 300 – 500 per kilonya dibandingkan biji yang tidak difermentasi.

Ada perbedaan perilaku penjualan antara desa yang dekat dengan pasar kecamatan (Desa Ladonge) dengan desa yang jauh dari pasar kecamatan (Desa Raraa/Pange-pange). Petani responden di Desa Ladonge menjual hasil biji kakaonya kepada pedagang pengumpul

yang umumnya langsung datang ke rumah petani dan pedagang tersebut bebas menjual kepada siapa saja.

Fenomena yang menarik dapat dilihat pada responden di lokasi yang jauh dari pasar kecamatan (Desa Raraa), yaitu cara yang dilakukan oleh pedagang pengumpul dalam mempertahankan eksistensinya membeli kakao di tingkat petani. Walaupun para petani tersebut bebas menjual ke pedagang pengumpul tersebut, tetapi dari segi jumlah sebenarnya pedagang pengumpul yang mencari kakao di desa ini jumlahnya tetap. Pernah ada pedagang pengumpul lainnya yang ingin mencari biji kakao di desa ini, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Pedagang pengumpul baru tersebut berani membeli dengan harga yang lebih tinggi, sehingga para petani banyak menjual kepadanya. Dengan melihat kondisi tersebut menyebabkan para pedagang pengumpul yang lama bersatu dan membuat kesepakatan untuk mencegah pedagang pengumpul baru tersebut, caranya dengan mencegat di tengah jalan dan memberikan sedikit ancaman.

Untuk Desa Pange-pange, petani responden menjual langsung ke pedagang pengumpul yang sudah menjadi langganan. Kata langganan ini disebabkan oleh kondisi petani yang mengantungkan segala keperluan rumah tangga dan budidaya kakao mereka kepada pedagang pengumpul tersebut dan pembayarannya dilakukan setiap kali panen dalam bentuk biji kakao. Selain menjual biji kakao, petani dikenakan juga bunga, seperti pada pinjaman beras ada bunga sebesar Rp. 500 per kilo (harga tunai Rp. 125.000 dan harga kredit Rp. 175.000). Urea Rp. 300 per kilo (harga tunai Rp. 70.000 dan kredit Rp. 85.000), SP 36 dan KCL dengan bunga sebesar Rp. 700 per kilo. Jangka waktu pinjaman rata-rata selama 8 bulan dan pinjaman ini tentunya sesuai dengan luas kakao yang mereka miliki. Bagi petani yang sudah terikat dengan satu pedagang pengumpul mereka tidak boleh meminjam atau menjual ke pedagang pengumpul lainnya.

Bakul

Bakul adalah sebutan untuk pedagang yang mengumpulkan biji kakao dari petani dan biasanya mereka hanya mengumpulkan dalam areal yang lebih sempit dibandingkan pedagang pengumpul. Umumnya mereka mengumpulkan dalam jumlah yang kecil dan ukuran yang biasa dipergunakan adalah liter. Dalam menjualpun tidak setiap hari, mereka mengumpulkan biji kakao tersebut di rumah dan menjual ke pasar terdekat pada hari pasar atau ke pedagang pengumpul yang ada di desa. Untuk pasar kecamatan, hari pasaran yang

ramai pada hari Rabu dan Minggu, kemudian diikuti pasar pada desa-desa lainnya. Sehingga secara keseluruhan setiap hari ada pasar di Kecamatan Ladonge.

Pedagang Pengumpul

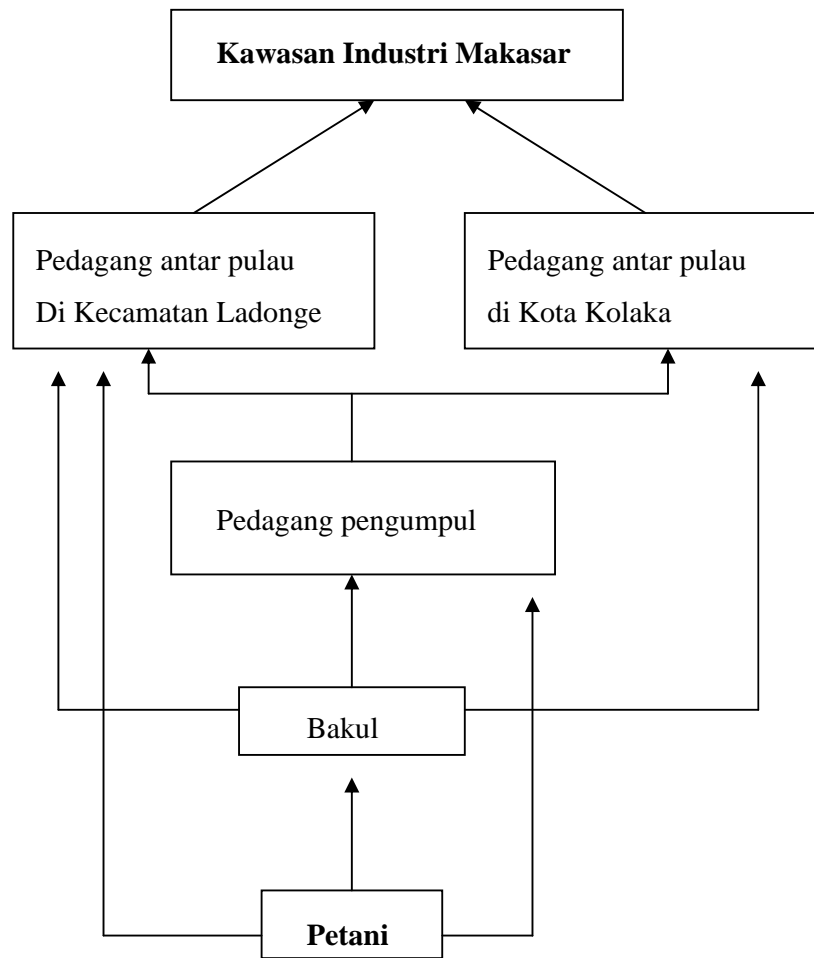
Pedagang pengumpul di kecamatan ini sangat banyak dan sangat beragam kemampuannya dalam pengadaan kakao. Ada beberapa cara yang dijalankan oleh para pedagang dalam mengumpulkan kakao tersebut, antara lain mengambil langsung ke rumah-rumah petani, melalui pedagang bakul yang ada di desa dan melalui pedagang yang mengumpulkan kakao di pasar kecamatan dan di pasar desa. Biji kakao yang sudah terkumpul tersebut kemudian diambil oleh pedagang antar pulau. Untuk menjamin adanya pasokan kakao, para pedagang pengumpul mengambil cara dengan memberikan bantuan atau pinjaman sarana produksi maupun dana segar ke petani kakao yang membutuhkan.

Pedagang Antar Pulau

Pedagang antar pulau mendapatkan biji kakao paling banyak dari pedagang pengumpul dan sekali-kali dari para bakul. Pedagang pengumpul itu ada yang bebas dan ada juga yang terikat. Keterikatan itu terjadi apabila pedagang antar pulau meminjamkan dana untuk pembelian kakao dan umumnya harga sudah ditentukan, apabila ada kenaikan harga pedagang pengumpul tersebut tidak bisa menjual ke pedagang antar pulau yang lainnya. Pedagang ini ada yang tinggal di kecamatan dan sebagian ada juga yang tinggal di kota Kolaka. Ciri-ciri umum untuk pedagang antar pulau di desa ini, yaitu mereka sudah mempunyai truk-truk dengan muatan besar. Sedangkan pedagang pengumpul hanya mempunyai mobil angkutan yang kecil, karena jarak dan tonasenya tidak terlalu besar. Tujuan terakhir dari kakao yang ada di Kecamatan Kolaka ini adalah pabrik kakao yang ada di Kawasan Industri Makasar (KIMA).

Marjin Pemasaran

Biji kakao yang diperdagangkan di lokasi penelitian ini adalah biji kakao asalan atau biji yang tidak difermentasi. Harga perkilonya menurut petani bisa berubah setiap harinya dan harga tersebut biasanya ditentukan oleh para pedagang. Menurut petani para pedagang mengambil keuntungan dari berat timbangan yang tidak semestinya dan penentuan kadar air yang hanya mempergunakan tangan (bukan dengan tester). Timbangan yang dipergunakan harus timbangan milik para pedagang, timbangan petani tidak diakui kebenarannya.



Gambar 1. Rantai Tata Niaga Kakao di Kabupaten Kolaka

Para bakul membeli dari petani dan menjual ke pedagang pengumpul dengan mengambil keuntungan kotor antara Rp. 300,00 – Rp. 500,00 perkilogramnya dan biaya yang harus dikeluarkannya hanya biaya transportasi ke pasar atau ke pedagang pengumpul. Tidak selamanya para bakul ini mendapatkan keuntungan, karena biji kakao tersebut tidak langsung dijual, selain itu dalam menentukan harga hanya berdasarkan perkiraan saja. Adapun perbedaan harga kakao tersebut berdasarkan kekeringan dan besarnya biji.

Pedagang pengumpul membeli kakao dari para bakul dan petani, harga dibedakan berdasarkan kering dan ukuran biji kakao. Mereka tidak mempergunakan alat pengukur, hanya berdasarkan perkiraan saja. Biji kakao tersebut kemudian dijual ke pedagang antar

pulau. Umumnya mereka mengambil keuntungan kotor Rp. 500,00 – Rp. 750.00 perkilogramnya. Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang ini hanya biaya untuk buruh yang menjemur lagi biji kakao yang dibeli. Upah dalam bentuk harian sebesar Rp. 30.000,00 per orang, untuk menjemur 1,5 ton biji kakao diperlukan dua orang tenaga kerja. Biji tersebut dijemur selama satu atau dua hari sampai kering kadar 7. Nantinya yang menjadi pengurangan harga adalah kadar keringnya dan yang menjadi dasar adalah kadar 7. Apabila biji kakao tersebut kadar 8, maka ada pengurangan harga 1 persen, bila kadarnya 10 harga berkurang 3 persen. Kadar yang paling jelek adalah kadar 15. Biji kakao tersebut dikumpulkan di depan rumah, kemudian nanti diambil oleh pedagang antar pulau. Bagi pedagang pengumpul yang langsung membawa ke pedagang antar pulau yang ada di kota Kolaka, mereka terpaksa mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp. 400.000,00 untuk kapasitas 6-7 ton biji kakao atau sekitar Rp. 57,00 - Rp 67,00 perkilogram.

Sortasi baru dilakukan di tingkat pedagang antar pulau, dengan cara membersihkan dari kotoran dan memisahkan berdasarkan ukuran biji. Penjemuran tetap dilakukan, sesuai dengan kadar 7 yang menjadi dasar harga. Biji kakao tersebut kemudian dibawa ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kawasan Industri Makasar (KIMA). Para pedagang ini mengambil keuntungan antara Rp. 1.500,00 – Rp. 2.000,00 perkilogram. Adapun biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya pengambilan kakao ke pedagang pengumpul sebesar Rp. 60,00 perkilogram dan biaya angkut ke Makasar sebesar Rp. 200,00 sampai Rp 300,00 perkilogram. Selain itu ada juga biaya bongkar dan muat Rp. 30,00 perkilogram dan retribusi untuk PAD Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 40,00 perkilogram. Selain biaya transportasi, ada juga biaya-biaya pemotongan yang harus dikeluarkan oleh pedagang antar pulau apabila tidak memenuhi standar perusahaan ekspor-impor tersebut. Biaya pemotongan ini bisa berbeda untuk setiap pedagang, tergantung dari hubungan yang sudah terjalin selama ini. Adapun yang menjadi standar di KIMA ini adalah: jamur 4 persen, kotor di biji 2 perser, biji sebanyak 110 per onsnya dan kadar air 7.

Harga yang mereka terima dari perusahaan di KIMA tersebut umumnya berubah dalam waktu seminggu. Pedagang yang menjual ke KIMA ini, ada pedagang yang bebas dan ada juga yang terikat. Terikat apabila pedagang tersebut membuat kontrak tonase dengan perusahaan dan harganya sudah ditetapkan. Sehingga pedagang ini bisa mendapatkan keuntungan yang besar apabila bisa mendapatkan harga dibawah harga kontrak dan tak jarang juga pedagang yang rugi besar, karena mereka mendapatkan harga yang jauh diatas harga kontrak sementara mereka harus tetap memasok ke perusahaan. Petani yang menjual langsung

ke pedagang antar pulau yang ada di Kolaka akan memberikan tambahan harga sebesar Rp. 200.00 – Rp. 300,00 perkilogram. Tetapi hal ini sangat jarang terjadi, karena jarak yang terlalu jauh.

3. Aspek Kelembagaan

Koperasi banyak terdapat di Kecamatan Lodonge ini, tetapi mereka hanya melayani simpan pinjam saja. Petani merasa susah untuk meminjam ke koperasi ini dan yang banyak memanfaatkan jasa koperasi ini adalah para pedagang. Dalam mendukung usahatani kakao, para petani banyak yang menggantungkan dari hasil penjualan kakao saja. Apabila ada kesulitan dalam pengadaan sarana produksi, petani dapat meminjam ke pedagang pengumpul dengan pembayaran biji kakao pada saat panen. Pinjaman ini ada yang berbunga dan ada juga yang tidak. Pinjaman yang berbunga banyak terdapat pada lahan bukaan baru, dimana sarana dan prasarana belum mendukung. Untuk pinjaman tanpa bunga dilakukan pedagang dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan pasokan biji kakao.

Pemerintah Dati I merencanakan akan membuat kawasan industri kakao di Kendari, saat ini lahannya sudah ada dan terletak tidak jauh dari lapangan pesawat terbang. Sekarang dalam tahap pembuatan gudang dan perencanaan pengadaan mesin-mesin. Adapun tujuan pembuatan kawasan industri kakao ini adalah ingin merebut kembali PAD yang selama ini masuk ke Pemerintahan Sulawesi Selatan. Disisi lain, Pemda Dati II Kolaka sekarang sedang membenahi pelabuhan penyeberangan (fery) yang biasa dilalui oleh truk-truk kakao yang akan menyeberang ke Makasar melalui Kabupaten Bone.

Bagi kalangan industri pengolahan kakao di Indonesia penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen yang dikenakan atas setiap pembelian kakao sangat memberatkan. Hal ini berakibat akan mematikan industri pengolahan kakao di dalam negeri dan dalam kondisi saat ini sudah banyak pengusaha yang memindahkan pabriknya ke Malaysia, walaupun tetap mempergunakan kakao Indonesia. Pemilihan Negara Malaysia sebagai tujuan karena negara ini tidak menerapkan pajak dan lokasinya tidak jauh dari sumber bahan baku. Hal ini terungkap pada pertemuan Asean Cocoa Club yang diadakan di Makassar pada tanggal 26 Juni 2003. Menurut ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Zulhefi Sikumbang, agar industri kakao kembali berjaya ada dua hal yang perlu disepakati yaitu: pencabutan PPN 10 persen dan standar mutu kakao. Dengan demikian permasalahan ini perlu mendapat perhatian pemerintah lebih lanjut, agar industri kakao Indonesia mampu bersaing dan devisa dari komoditi kakao ini tidak tersedot keluar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara umum perkembangan produksi kakao di Propinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan, hal ini direpresentasikan dari peningkatan luas tanam 4,13 persen pertahun dan peningkatan produksi 9,8 persen pertahun.
2. Di lokasi penelitian serangan hama dan penyakit kakao yang menonjol pada tahun 2003 adalah busuk buah. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi produksi hingga 40-50 persen.
3. Tidak ada aktivitas pasca panen, karena tidak ada perbedaan harga antara biji kakao yang difermentasi dengan yang tidak difermentasi.
4. Biji kakao petani umumnya masuk ke Kawasan Industri Makassar (KIMA) melalui pedagang bakul, pedagang pengumpul dan pedagang antar pulau. Petani yang dekat ke pasar kecamatan relatif lebih bebas menjual biji kakao dibandingkan petani yang lokasinya jauh dari pasar kecamatan. Pedagang pengumpul yang beroperasi di desa yang jauh dari pasar kecamatan lebih bersifat oligopoli untuk mempertahankan kelancaran pasokan bahan baku dari petani.
5. Margin pemasaran yang diterima oleh pedagang bakul sekitar Rp 300,00 – Rp 500,00 per kilogram, pedagang pengumpul sekitar Rp 500,00 – Rp 700,00 perkilogram dan pedagang antar pulau sekitar Rp 1.500,00 – Rp 2.000,00 per kilogram. Namun demikian resiko yang ditanggung oleh pedagang antar pulau lebih besar dibanding resiko yang ditanggung oleh bakul dan pedagang pengumpul.

Saran

1. Penanganan serangan hama dan penyakit perlu lebih ditingkatkan mengingat dampak yang ditimbulkan dari serangan tersebut sangat mempengaruhi produksi dan kualitas kakao yang dihasilkan. Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan oleh dinas terkait secara intensif mengenai penanganan serangan hama dan penyakit.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas biji kakao, maka penanganan pasca panen perlu mendapatkan perhatian lebih serius oleh pemerintah. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan cara memasukkan materi penanganan pasca panen dalam program-program pelatihan kakao di tingkat petani.
3. Perlu ditinjau lagi mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas pembelian kakao, karena banyak pengusaha yang memindahkan pabriknya ke

Malaysia yang tidak menerapkan pajak namun tetap menggunakan bahan baku kakao Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, Dale C. 1997. *Market and Price Analysis*. The Agricultural Industries. McGraw-Hill.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2000. *Statistik Perkebunan Indonesia 1998 – 2000*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Kompas. 2003. *Industri Kakao Minta PPN 10 Persen Dihapus*. Pp. 29, Tanggal 27 Juni 2003. Jakarta.
- Laporan Akhir SL-PHT Petani Murni. 2002. *Profil Coklat*. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Sulawesi Utara.
- Prasetyo B, Agustian A, Siswanto, Hastuti.S.S, dan Setyanto.A. 2002. *Studi Pendasaran, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Hama Terpadu Pada Tanaman Kakao*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bagian Proyek Penelitian dan Pengembangan Hama Terpadu Tanaman Perkebunan. Jakarta.
- Siregar, Tumpal H.S, Slamet R. dan Laeli N. 1992. *Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Cokelat*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Roesmanto, Joko. 1991. *Kakao, Kajian Sosial Ekonomi*. Aditya Media. Yogyakarta.